

**Bagian VIIIb**

**FAKULTAS**

**HUKUM**

## *Daftar Isi*

● PENDAHULUAN	VIIIb.1.1
● VISI, MISI dan TUJUAN	VIIIb.2.1
● PROGRAM PENDIDIKAN	VIIIb.3.1
● FASILITAS	VIIIb.4.1
● STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA	VIIIb.5.1
● TENAGA KEPENDIDIKAN	VIIIb.6.1

## PENDAHULUAN

Sejak masih bernama Universitas TRISAKTI pada tahun 1966, Fakultas Hukum merupakan salah satu dari tiga fakultas (farmasi, hukum dan ekonomi) yang dimiliki UBAYA. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/PT/III/1968, tanggal 5 September 1968, Program Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UBAYA berstatus **Terdaftar**.

Fakultas Hukum UBAYA telah meniti waktu demi waktu dengan semangat dan tekad bulat mewujudkan tujuan yang digariskan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) 1976 – 1983, yaitu menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan analitis, keahlian dan ketrampilan di bidang hukum, berkepribadian baik serta berpartisipasi dalam era pembangunan. Dengan diterbitkannya Pola Umum Pengembangan Jangka Panjang UBAYA 1984, sebagai pengganti RIP 1976 – 1983, Fakultas Hukum UBAYA melakukan pemantapan di bidang kurikulum. Sejalan dengan itu, pada tahun akademik 1982 – 1983 penyelenggaraan pendidikan hukum di Fakultas Hukum UBAYA dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.

Pada tanggal 18 Februari 1985, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 071/O/1985, Fakultas Hukum UBAYA memperoleh status **Diakui**. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 1986, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0611/O/1986, Fakultas Hukum UBAYA memperoleh status akreditasi **Disamakan** untuk 6 jurusan, yakni :

- Jurusan Hukum Perdata
- Jurusan Hukum Pidana
- Jurusan Hukum Administrasi Negara
- Jurusan Hukum Tata Negara
- Jurusan Hukum Internasional
- Jurusan Hukum Acara

Dengan status akreditasi tersebut, Fakultas Hukum UBAYA dipercaya pemerintah untuk menyelenggarakan ujian negara sendiri yang terintegrasi dalam Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Pada tahun 1993, program pendidikan tinggi ilmu hukum mengalami reorientasi pendidikan yang dilaksanakan secara mono-program, menjadi program studi ilmu hukum. Bersama dengan itu pula diberlakukan Kurikulum Nasional (KURNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0325/U/1994. Pada tahun akademik 1994 – 1995 Fakultas Hukum UBAYA mulai berkiprah sekaligus memantapkan cita-cita sebagaimana digariskan dalam **Pola Orientasi Pengembangan**, yang berorientasi pada masyarakat Bisnis-Industri, dengan muatan kurikulum yang mengarah pada Business Law.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 326/U/1994 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, telah dilakukan reformasi pendidikan dengan melaksanakan kembali penilaian akreditasi bagi program studi-program studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berstatus **Disamakan**. Tiga program studi di UBAYA, diantaranya **ilmu hukum** dinilai pada akreditasi tahap pertama pada tahun 1996 – 1997. Melalui surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/BAN-PT/Ak.I/ VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi A dan mendapat kepercayaan membina program studi sejenis. Peringkat tersebut berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Pada tahun 2003 telah dilakukan akreditasi yang kedua oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/BAN-PT/ Ak-VII/S1/VII/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana Strata-1 di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA kembali memperoleh peringkat akreditasi A.

Pada tahun 2011 telah dilakukan akreditasi yang ketiga oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN-PT Nomor 025/BAN-PT/Ak-XIV/ IX/ 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi B.

Pada tahun 2015 telah dilakukan akreditasi yang keempat oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN-PT Nomor 1257/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2015 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi B.

Namun demikian setelah dilakukan *surveilance* pada tahun 2016, berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1141/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2016, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya dinyatakan terakreditasi dengan peringkat A. Surat keputusan tersebut berlaku sejak 19 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2020.

Perolehan peringkat akreditasi tersebut layak diperhitungkan dalam pengembangan akademis lebih lanjut sebagai suatu tantangan, karena akreditasi merupakan pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi tersebut dalam memenuhi standar kualifikasi tertentu, sehingga lulusannya diharapkan mampu memperoleh kepercayaan pengguna jasa untuk menjalankan praktik profesinya, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

## VISI, MISI dan TUJUAN

**Visi** : Menjadi Fakultas Hukum yang Berkualitas untuk Memenuhi Kebutuhan Hukum bagi Masyarakat.

**Makna** :

Menjadi Fakultas yang memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena memiliki kualitas keilmuan dan penerapan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki kualitas layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Misi** :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
3. Mendorong terwujudnya komunitas fakultas hukum untuk mampu berperan aktif di tingkat nasional dan internasional

**Tujuan**:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam era global
2. Membentuk dan mengembangkan jejaring kerjasama di bidang penelitian dan layanan hukum

## **PROGRAM PENDIDIKAN**

### **1. Kurikulum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2002, Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 1999 telah ditinjau kembali dan disempurnakan serta disahkan menjadi kurikulum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2004 yang secara efektif telah berlaku terhitung mulai semester gasal tahun akademik 2004 – 2005 dan seterusnya.

Pada tahun 2017, dimulai kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2017 yang diarahkan untuk mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana dimaksudkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Mata kuliah-mata kuliah di Fakultas Hukum dapat dikelompokkan menjadi

1. Kelompok Mata kuliah wajib
2. Kelompok Mata Kuliah Program peminatan:
  - a. Peminatan Keperdataan
  - b. Peminatan Pidana
  - c. Peminatan Ketatanegaraan
  - d. Peminatan Administrasi Negara
  - e. Peminatan Internasional

## 2. Pelaksanaan Kurikulum

- mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan diasajikan berdasarkan semester dengan memperhitungkan beberapa mata kuliah yang akan tetap disajikan sepanjang semester. Mata Kuliah-mata kuliah tersebut adalah: **Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Filsafat Hukum, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Penalaran Hukum, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara** dengan tetap memperhatikan persyaratan minimal dibukanya kelas sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Universitas.
- Semua mata kuliah yang pernah ditempuh, dihargai dengan sejumlah satuan kredit semester (sks)
- Pengambilan mata kuliah untuk diprogramkan harus memperhatikan alur prasyarat mata kuliah
- Pengambilan ulang mata kuliah yang telah dievaluasi diperkenankan, dengan catatan pengulangan untuk mata kuliah dengan nilai  $\geq C$  yang akan diperhitungkan adalah **hasil nilai akhir**
- Mahasiswa yang telah mengumpulkan  $\geq 100$  sks dengan nilai minimal D dapat mengajukan permohonan Program Peminatan (Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, dan Hukum Internasional) sesuai dengan minat dan bakatnya kepada Dekan c.q. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
- Penyusunan skripsi dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh 117 sks, lulus Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum  $\geq C$ , minimal 2 mata kuliah program peminatan, dan memenuhi persyaratan TOEFL  $\geq 400$  dengan mengajukan permohonan kepada Dekan c.q. Wakil Dekan I.
- Untuk mata kuliah program peminatan, mahasiswa wajib mengambil 14 sks dengan ketentuan sebagai berikut: 10 sks wajib dari mata kuliah di program peminatannya, sedangkan 4 sks diambil dari mata kuliah pada program peminatan lainnya yang akan menunjang skripsi (penulisan hukum).

## 3. Prasyarat dan Alur Mata Kuliah

Dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan fakultas, maka pada proses pembelajaran dan penyajian mata kuliah perlu ditetapkan prasyarat dan alur mata kuliah sebagaimana terurai dalam tabel 3 dan tabel 4.

## 4. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah berhasil menyelesaikan Program Sarjana Hukum, apabila memenuhi syarat-syarat:

- telah mengumpulkan  $\geq 149$  sks
- IP Kumulatif  $\geq 2,00$
- tidak ada **nilai E**
- nilai Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi negara dan Pancasila & Kewarganegaraan nilai  $\geq c$
- nilai D maksimal 20% dari 149 sks = 30 sks
- lulus ujian skripsi dengan nilai  $\geq C$

Tabel 1

**MATAKULIAH PRASYARAT KURIKULUM 2017  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

Mata kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang harus ditempuh terlebih dahulu dengan nilai minimal sebelum menempuh mata kuliah tertentu. Beberapa matakuliah ditentukan mata kuliah prasyarat haruslah sudah ditempuh dengan nilai minimal C yang menunjukkan kompetensi minimal mahasiswa.

Contoh: Hukum Perdata adalah mata kuliah prasyarat bagi Hukum Acara Perdata, mahasiswa harus terlebih dahulu menempuh mata kuliah Hukum Perdata dengan nilai minimal tertentu. (Perhatikan Tabel berikut ini)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS
<b>I. KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN</b>					
1	1000A002	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3		
2		PENDIDIKAN AGAMA:	3		
	1000A003	- ISLAM			
	1000A004	- KATOLIK			
	1000A005	- PROTESTAN			
	1000A006	- HINDU			
	1000A007	- BUDHA			
	1000A008	- KONG HU CU			
3	1201A0245	BAHASA INDONESIA	2		
<b>II. KELOMPOK MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN</b>					
4	1201A0101	Pengantar Ilmu Hukum	4		
5	1201A0102	Pengantar Hukum Indonesia	4		
6	1201A0103	Ilmu Negara	4		
7	1201A0204	Hukum Perdata	4	Pengantar Hukum Indonesia $\geq$ D	4
8	1201A0205	Hukum Pidana	4	Pengantar Hukum Indonesia $\geq$ D	4
9	1201A009	Hukum Tata Negara	4	Ilmu Negara $\geq$ D	4
10	1201A0206	Hukum Administrasi Negara	4	Ilmu Negara $\geq$ D	4
11	1201A011	Hukum Dagang	3	Hukum Perdata $\geq$ C	4
12	1201A0207	Hukum Adat	2		
13	1201A0415	Hukum Islam	2		
14	1201A0208	Hukum Internasional	4	Pengantar Hukum Indonesia $\geq$ D	4
15	1201A012	Hukum Agraria/Tanah	4	Hukum Adat $\geq$ D	2
16	1201A014	Hukum Acara Perdata	3	Hukum Perdata $\geq$ C	4
17	1201A010	Hukum Acara Pidana	3	Hukum Pidana $\geq$ C	4
18	1201A031	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	Hukum Administrasi Negara $\geq$ C	4
19	1201A037	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Hukum Tata Negara $\geq$ C	4
20	1201A034	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2	Hukum Perdata $\geq$ C	4
				Hukum Pidana $\geq$ C	4
				Hukum Administrasi Negara $\geq$ C	4
				Hukum Tata Negara $\geq$ C	4
				Hukum Internasional $\geq$ C	4



III. KELOMPOK MATA KULIAH KEAHLIHAN BERKARYA					
21	1201A043	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)	6	KETERANGAN:	
		<b>KEAHLIAN LITIGASI:</b>		SYARAT PENGAMBILAN MATAKULIAH	
		PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA		PLKH ADALAH TELAH MENEMPUH SEMUA	
		PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA PIDANA		MATA KULIAH DI BAWAH INI DENGAN	
		PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA		NILAI MINIMAL $\geq$ D, YAITU: HUKUM ACARA	
		<b>KEAHLIAN NON LITIGASI:</b>		PERDATA, HUKUM ACARA PIDANA, HUKUM	
		PRAKTIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,	
		PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN		HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI,	
		PRAKTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		DAN MINIMAL 2 MATA KULIAH PROGRAM	
		PRAKTIK PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK		PEMINATAN	
PRAKTIK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE					
22	1201A044	SKRIPSI/TUGAS AKHIR	4	KETERANGAN:	
				PENGAJUAN PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS	
				AKHIR ADALAH TELAH MENEMPUH $\geq$ 117	
				SKS, TERMASUK MATA KULIAH METODE	
				PENELITIAN HUKUM DENGAN NILAI $\geq$ C	
				DAN MINIMAL 2 MATA KULIAH PROGRAM	
				PEMINATAN	
IV. KELOMPOK MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA					
23	1201A042	FILSAFAT HUKUM	4	PENGANTAR ILMU HUKUM $\geq$ D	4
V. KELOMPOK MATA KULIAH KEHIDUPAN BERSAMA					
24	1201A027	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	2	HUKUM PERDATA $\geq$ C	4
				HUKUM PIDANA $\geq$ C	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
				HUKUM TATA NEGARA $\geq$ C	4
25	1201A022	HAK ASASI MANUSIA	2		

VI. KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM					
26	1000A009	ETIKA MULTIKULTURAL	2		
27	1201A0146	BAHASA INGGRIS	2		
28	1201A047	KEWIRAUSAHAAN	3		
29	1201A041	METODE PENELITIAN HUKUM	2	BAHASA INDONESIA $\geq$ D	2
				HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL $\geq$ D	2
30	1201A038	HUKUM LINGKUNGAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
31	1201A025	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	2	HUKUM TATA NEGARA $\geq$ C	4
32	1201A035	PEMERINTAHAN DAERAH	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
33	1201A030	ORGANISASI INTERNASIONAL	2	HUKUM INTERNASIONAL $\geq$ C	4
34	1201A021	HUKUM LAUT	2		
35	1201A026	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	2	HUKUM PIDANA $\geq$ C	4
36	1201A040	PENALARAN HUKUM	2	HUKUM PERDATA $\geq$ C	4
				HUKUM PIDANA $\geq$ C	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
				HUKUM TATA NEGARA $\geq$ C	4
37	1201A028	HUKUM KEWARGANEGARAAN	2		4
38	1201A016	HUKUM PERIKATAN	3	HUKUM PERDATA $\geq$ C	4
39	1201A013	HUKUM PAJAK	3		4
40	1201A019	HUKUM PERSEKUTUAN	2	HUKUM DAGANG $\geq$ D	3
41	1201A023	HUKUM PERIZINAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
42	1201A017	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	HUKUM PERDATA $\geq$ C	4
43	1201A020	HUKUM PERBURUHAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
44	1201A033	KEJAHATAN EKONOMI	2	HUKUM PIDANA $\geq$ C	4
45	1201A036	HUKUM PENANAMAN MODAL	2		4
46	1201A039	HAK MILIK INTELEKTUAL	2	HUKUM DAGANG $\geq$ D	3
47	1201A018	HUKUM ASURANSI	2	HUKUM DAGANG $\geq$ D	3
48	1201A029	HUKUM JAMINAN	2	HUKUM PERIKATAN $\geq$ D	3
49	1201A032	HUKUM PENGANGKUTAN	3	HUKUM DAGANG $\geq$ D	3
50	1201A024	HUKUM PERBANKAN	2	HUKUM PERDATA $\geq$ C	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA $\geq$ C	4
VII. KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN					
PROGRAM PEMINATAN KEPERDATAAN					
51	1201A101	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	2	KETERANGAN:	
52	1201A102	HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	2	SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH $\geq$ 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM PERDATA MINIMAL $\geq$ C	
53	1201A103	TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL	2		
54	1201A104	HUKUM KEPAILITAN	2		
55	1201A105	HUKUM PASAR MODAL	2		
56	1201A106	HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA	2		
57	1201A107	ARBITRASE PERDAGANGAN INTERNASIONAL	2		

PROGRAM PEMINATAN PIDANA				
58	1201A108	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH $\geq$ 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM PIDANA MINIMAL $\geq$ C
59	1201A109	HUKUM PENITENSIER	2	
60	1201A110	KEJAHATAN KORPORASI	2	
61	1201A111	KEJAHATAN SIBER	2	
62	1201A112	HUKUM FORENSIK	2	
63	1201A113	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	2	
64	1201A114	SISTEM PERADILAN ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	2	
PROGRAM PEMINATAN ADMINISTRASI NEGARA				
65	1201A115	HUKUM KEUANGAN NEGARA	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH $\geq$ 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MINIMAL $\geq$ C
66	1201A116	HUKUM KESEHATAN	2	
67	1201A117	HUKUM TATA RUANG	2	
68	1201A118	HUKUM KEPEGAWAIAN	2	
69	1201A119	HUKUM PELAYANAN PUBLIK	2	
70	1201A120	HUKUM RUMAH SUSUN/KONDOMINIUM	2	
71	1201A121	HUKUM KEIMIGRASIAN DAN KEPABEANAN	2	
PROGRAM PEMINATAN INTERNASIONAL				
72	1201A122	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH $\geq$ 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM INTERNASIONAL MINIMAL $\geq$ C
73	1201A123	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	
74	1201A124	HUKUM HUMANITER	2	
75	1201A125	HUKUM PERADILAN INTERNASIONAL	2	
76	1201A126	HUKUM UDARA DAN ANGKASA	2	
77	1201A127	HUKUM EKSTRADISI	2	
78	1201A128	HUKUM PENGUNGS	2	
PROGRAM PEMINATAN KETATANEGARAAN				
79	1201A129	KEPARTAIAN & ORGANISASI MASYARAKAT	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH $\geq$ 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM TATA NEGARA MINIMAL $\geq$ C
80	1201A130	KEKUASAAN YUDISIIL	2	
81	1201A131	HUKUM PEMILIHAN UMUM	2	
82	1201A132	HUKUM KONSTITUSI	2	
83	1201A133	PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA	2	
84	1201A134	KELEMBAGAAN NEGARA	2	
85	1201A135	PERLINDUNGAN HAK BAGI KELOMPOK MINORITAS	2	

Tabel 2

**MATA KULIAH FAKULTAS HUKUM  
KURIKULUM 2017**

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
I	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	1000A002	3
	PENDIDIKAN AGAMA		
	- ISLAM	1000A003	3
	- KATOLIK	1000A004	
	- PROTESTAN	1000A005	
	- HINDU	1000A006	
	- BUDHA	1000A007	
	- KONG HU CU	1000A008	
	BAHASA INGGRIS	1201A0146	2
PENGANTAR ILMU HUKUM	1201A0101	4	
PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1201A0102	4	
ILMU NEGARA	1201A0103	4	
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
III	HUKUM ACARA PIDANA	1201A010	3
	HUKUM TATA NEGARA	1201A009	4
	HUKUM DAGANG	1201A011	3
	HUKUM AGRARIA/TANAH	1201A012	4
	HUKUM PAJAK	1201A013	3
	HUKUM ACARA PERDATA	1201A014	3
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
V	HAK ASASI MANUSIA	1201A022	2
	HUKUM PERIZINAN	1201A023	2
	HUKUM PERBANKAN	1201A024	2
	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	1201A025	2
	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	1201A026	2
	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	1201A027	2
	HUKUM KEWARGANEGARAAN	1201A028	2
	HUKUM JAMINAN	1201A029	2
	ORGANISASI INTERNASIONAL	1201A030	2
	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	1201A031	2
	<b>TOTAL</b>		

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
II	HUKUM PERDATA	1201A0204	4
	HUKUM PIDANA	1201A0205	4
	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1201A0206	4
	HUKUM ADAT	1201A0207	2
	BAHASA INDONESIA	1201A0245	2
	HUKUM INTERNASIONAL	1201A0208	4
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>

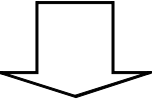
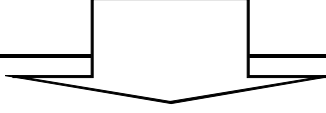
SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
IV	HUKUM ISLAM	1201A015	2
	HUKUM PERIKATAN	1201A016	3
	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	1201A017	2
	HUKUM ASURANSI	1201A018	2
	HUKUM PERSEKUTUAN	1201A019	2
	HUKUM PERBURUHAN	1201A020	2
	ETIKA MULTIKULTURAL	1000A009	2
	KEWIRAUSAHAAN	1201A047	3
	HUKUM LAUT	1201A021	2
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
VI	HUKUM PENGANGKUTAN	1201A032	3
	KEJAHATAN EKONOMI	1201A033	2
	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1201A034	2
	PEMERINTAHAN DAERAH	1201A035	2
	HUKUM PENANAMAN MODAL	1201A036	2
	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	1201A037	2
	HUKUM LINGKUNGAN	1201A038	2
	2 MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN		4
<b>TOTAL</b>			<b>19</b>

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
VII	HAK MILIK INTELEKTUAL	1201A039	2
	PENALARAN HUKUM	1201A040	2
	METODE PENELITIAN HUKUM	1201A041	2
	FILSAFAT HUKUM	1201A042	4
	5 MATAKULIAH PROGRAM PEMINATAN		10
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
VIII	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM	1201A043	6
	SKRIPSI/TUGAS AKHIR	1201A044	4
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

**Tabel 3**  
**ALUR MATA KULIAH**

SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER III	SEMESTER IV	SEMESTER V	SEMESTER VI	SEMESTER VII	SEMESTER VIII
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	HUKUM PERDATA	HUKUM ACARA PIDANA	HUKUM ISLAM	HAK ASASI MANUSIA	HUKUM PENGANGKUTAN	HAK MILIK INTELEKTUAL	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM
PENDIDIKAN AGAMA	HUKUM PIDANA	HUKUM TATA NEGARA	HUKUM PERIKATAN	HUKUM PERIZINAN	KEJAHATAN EKONOMI	PENALARAN HUKUM	SKRIPSI/TUGAS AKHIR
BAHASA INGGRIS	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	HUKUM DAGANG	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	HUKUM PERBANKAN	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	METODE PENELITIAN HUKUM	
PENGANTAR ILMU HUKUM	HUKUM ADAT	HUKUM AGRARIA/TANAH	HUKUM ASURANSI	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	PEMERINTAHAN DAERAH	FILSAFAT HUKUM	
PENGANTAR HUKUM INDONESIA	BAHASA INDONESIA	HUKUM PAJAK	HUKUM PERSEKUTUAN	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	HUKUM PENANAMAN MODAL		
ILMU NEGARA	HUKUM INTERNASIONAL	HUKUM ACARA PERDATA	HUKUM PERBURUHAN	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI		
			ETIKA MULTIKULTURAL	HUKUM KEWARGANEGARAAN	HUKUM LINGKUNGAN		
			KEWIRAUSAHAAN	HUKUM JAMINAN			
			HUKUM LAUT	ORGANISASI INTERNASIONAL			
				HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA			
			ENGLISH COURSE				
					 MK PROGRAM PEMINATAN (PERHATIKAN SYARAT)		

## **4. Pedoman Umum Penyusunan Skripsi**

### **4.1 Pengertian**

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian lapangan dan/ atau kepustakaan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), sesuai dengan program kekhususannya.

### **4.2 Persyaratan pengajuan**

Mahasiswa yang sudah mengumpulkan 117 sks diperkenankan mengajukan permohonan penulisan skripsi dan didahului dengan proposal skripsi.

### **4.3 Proposal Skripsi**

Sebelum mahasiswa membuat skripsi terlebih dahulu mahasiswa harus membuat proposal skripsi, yang terdiri dari:

- Latar Belakang Masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penulisan
- Metodologi
- Pertanggungjawaban Sistematika
- Bahan Bacaan Awal (minimal 5 buku)

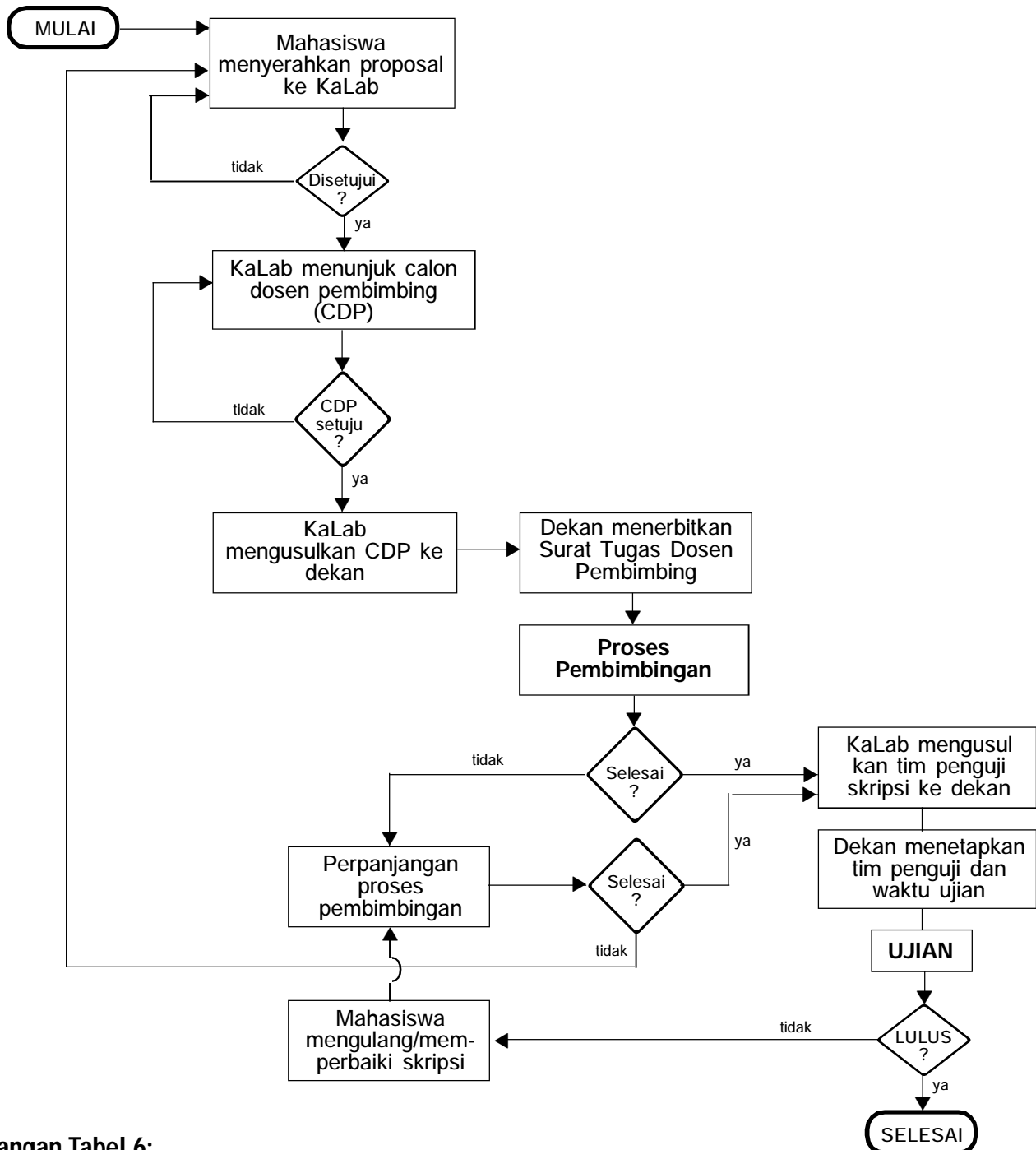
### **4.4 Untuk Penulisan skripsi lebih lanjut mengikuti Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 183 Tahun 2018.**

Untuk itu diperhatikan:

- Penulisan kutipan dengan format APA
- Penulisan daftar referensi dengan format APA

Tabel 4

## ALUR dan TATA CARA PENYUSUNAN SKRIPSI



## Keterangan Tabel 6:

- ⊙ Bimbingan skripsi dilaksanakan selama jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Tugas bimbingan;
- ⊙ Bila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut di atas penyusunan skripsi belum selesai / siap untuk diuji, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan bimbingan selama 6 bulan;
- ⊙ Bila masa perpanjangan berakhir dan skripsi tetap belum selesai/siap diuji, maka penyusunan skripsi tersebut dinyatakan gugur .

## FASILITAS

### 1. Laboratorium

Merupakan penunjang pelaksana (psikomotor) di bidang pendidikan akademik dan profesional yang meliputi kemampuan litigasi dan non-litigasi yang digunakan untuk praktik bagi mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

### 2. Ruang Pengadilan Semu (Moot Court)

Merupakan tempat pelatihan praktik mahasiswa di bidang litigasi untuk semua jenis perkara serta praktik bagi peserta mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum untuk menjadi praktisi yang profesional.

### 3. Biro Bantuan Hukum (BBH)

Merupakan salah satu kegiatan di bidang pengabdian masyarakat antara lain pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi masyarakat/pencari keadilan.

### 4. Pusat Kajian/Kelompok kajian

Merupakan unsur pelaksana dari laboratorium-laboratorium yang ada di Fakultas Hukum dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan akademik, antara lain kelompok Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 5. Kantor Layanan Hukum (KLH)

Wadah perwujudan University - Industry - linkages, yang kegiatannya meliputi:

- Konsultasi hukum bisnis, hukum perbankan, hukum perburuhan, hak kekayaan intelektual/hak cipta, paten, dan merek
- Pelatihan yang berkaitan dengan hukum bisnis
- Seminar dan Short Course
- Negosiasi, mediasi
- Litigasi di bidang: hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi/perburuhan

### 6. English Course

Kursus Bahasa Inggris setara TOEFL ini diselenggarakan oleh fakultas untuk para mahasiswa semester genap tahun ketiga agar mereka siap menerima perkuliahan yang disampaikan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Kursus ini bersifat wajib dengan passing grade  $\geq 400$ .

### 7. Koleksi Khusus

Merupakan perpustakaan fakultas yang berupa sarana penunjang pendidikan hukum, dalam bentuk literatur, artikel, jurnal, makalah, penelitian, dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

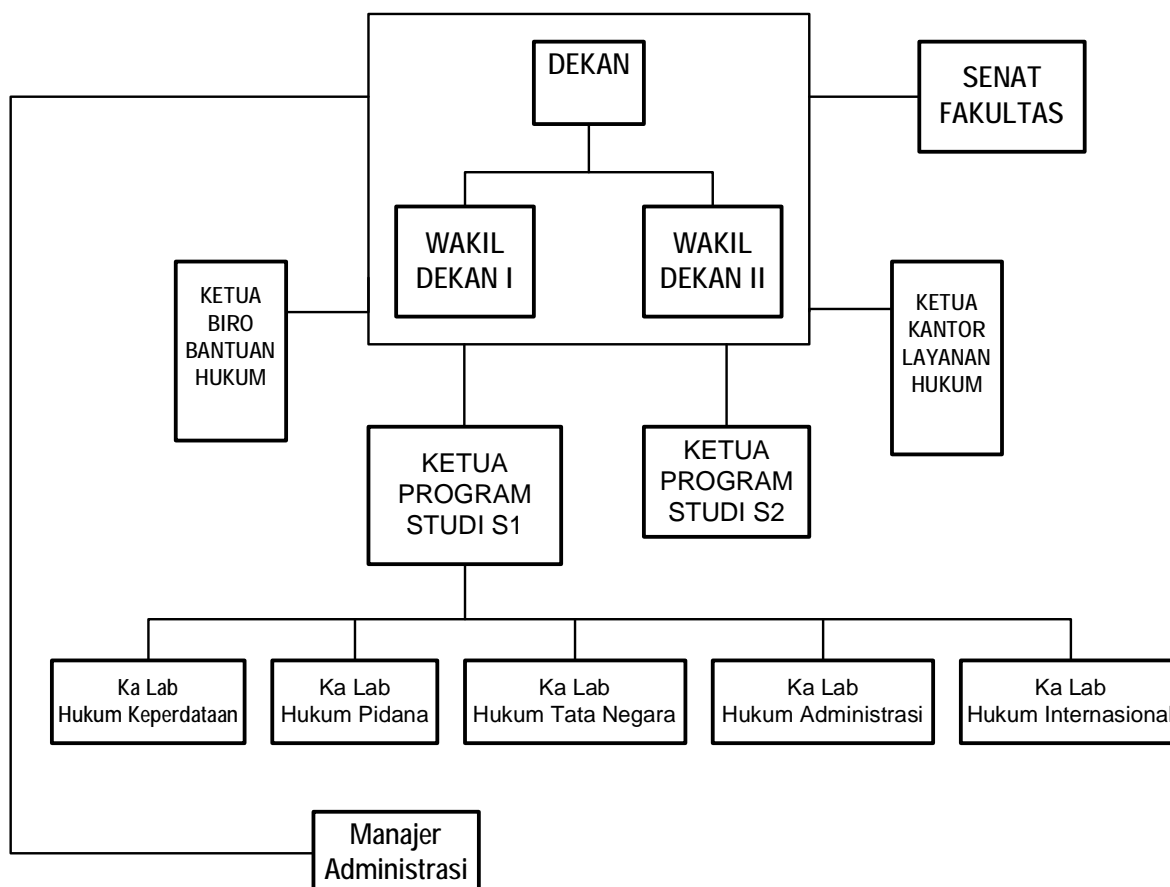
### 8. Media Hukum

Untuk menampung pemikiran ilmiah tentang hukum yang selalu berkembang bagi para akademisi dan ahli-ahli hukum lainnya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya menerbitkan jurnal YUSTIKA yang terbit dua kali setiap tahun.



## STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA

### 1. Struktur Organisasi



## 2. Personalia

Dekan	: Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan II	: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	: Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Ketua Laboratorium	
- Hukum Keperdataan	: Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.
- Hukum Pidana	: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
- Hukum Tata Negara	: Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
- Hukum Administrasi	: Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
- Hukum Internasional	: Suhariwanto, S.H., M.Hum.
Ketua Non Laboratorium	: Ex Officio Dekan Fakultas Hukum
Kepala Biro Bantuan Hukum	: Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.
Koordinator Kantor Layanan Hukum	: Ex Officio Dekan Fakultas Hukum
Manajer Administrasi	: Khomarul Alkarimah, S.E., M.M.

## TENAGA KEPENDIDIKAN

### 1. Dosen Tetap

No.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	181005	Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.	Hukum Agraria/Tanah
2	182003	Irtta Windra Syahrial, S.H., M.S.	1. Hak Milik intelektual 2. Hukum Perdata
3	186017	Elly Hernawati, S.H., M.Hum.	1. Hak Milik Intelektual 2. Hukum Islam
4	186018	Suhariwanto, S.H., M.Hum.	1. Hukum Perburuhan 2. Hukum Internasional
5	187022	H. Martono, S.H., M.Si.	Hak Asasi Manusia
6	188003	Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.	1. Organisasi Internasional 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7	189002	Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.	1. Hukum Kewarganegaraan 2. Pemerintahan Daerah
8	189019	Sriwati, S.H., M.Hum.	Hukum Agraria / Tanah
9	191001	Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	Organisasi Internasional
10	195042	Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.	1. Hukum Pajak 2. Hukum Perdata Waris
11	196008	Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.	1. Hak Milik Intelektual 2. Hukum Asuransi
12	196027	Dra. Anastasia Innurtrisniyati, M.S.i.	1. Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Etika Multikultural
13	197002	Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.	Hukum Lingkungan (AMDAL & ADR)
14	197002	Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.	1. Viktimologi dan Kriminologi 2. Hukum Pidana
15	197025	Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.	Hukum Penanaman Modal
16	200059	Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.	Perjanjian Internasional
17	201019	Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.	1. Hukum Kepailitan 2. Hukum Perbankan
18	201040	Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	Hukum Administrasi Negara
19	203015	Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.	1. Hukum Pidana 2. Kejahatan Ekonomi
20	204023	Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.	1. Kejahatan Siber 2. Kejahatan Ekonomi (Tindak Pidana Pencucian Uang)
21	207013	Marlina S.H., M.Hum.	Hukum Laut
22	210035	Hwian Christianto, S.H., M.Hum	1. Kapita Selecta Hukum Pidana 2. Kejahatan Korporasi
23	212004	Paula Swandayani Hartanto, S.H., M.Kn.	1. Hukum Persaingan Usaha 2. Hukum Kontrak
24	215014	Nabbilah Amir, S.H., M.H.	Hukum Tata Ruang
25	215020	Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.	Kejahatan Siber
26	215133	Soetrisno, S.H., M.Hum.	1. Hukum Persekutuan 2. Hukum Adat

No.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
27	216003	Ery Aristo, S.H., M.Kn.	Hukum Agraria
28	216055	Edy Hendrawan, S.H., M.H.	Hukum Perusahaan
29	216077	Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.	Kejahatan Korporasi
30	217012	Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.	Hukum Internasional
31	217019	Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.	Hukum Keuangan Negara
32	218009	Utiyafina Mardhati Hazhin, S.H., M.H.	Hukum Asuransi
33	218010	Michelle Kristina, S.H., M.H.	Kejahatan Korporasi
34	218011	Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.	Perlindungan Konsumen
35	217025	Henry Soegeng, S.H., H.Hum., MBA.	Hukum Lingkungan
36	217034	H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.	1. Hukum Dagang 2. Negara Hukum dan Demokrasi
37	217035	H. Sudarsono, S.H., M.S.	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Waris Adat
38	217036	Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.	1. Hukum Keuangan Negara 2. Pemerintahan Daerah
39	217055	Yusrambono, S.H., M.Si.	Hukum Asuransi

### 3. Dosen MIPA / MKU Tidak Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	209112	Drs. Ali Fauzi, M.Si.	- Agama Islam
2.	209115	Drs. Harimullah, M.Si.	- Agama Islam
3.	217120	Siti Zuraida, S.H., M.Hum.	- Agama Islam
4.	202046	M. Arbi Hidayat, S.Si., M.Si.	- Agama Islam
5.	212146	Ali Mahsun, M.Pd.I.	- Agama Islam
6.	214131	Mahsan, S.HI., M.Pd.I.	- Agama Islam
7.	209102	Drs. Josep Sintar	- Agama Katolik
8.	210242	Drs. A.W. Susmono, M.MPd.	- Agama Katolik
9.	179016	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Agama Katolik
10.	209109	Thomas Bejo Utomo, S.Th., M.A.	- Agama Protestan
11.	213145	Yakop C.K. Saragih, S.Si.	- Agama Protestan
12.	213146	Pdt. Ponco Mujiono Basuki, S.Th., M.Mis.	- Agama Protestan
13.	209107	Tosin, S.H., M.H.	- Agama Budha
14.	209111	Irwan Pontoh, S.E., M.Psi.	- Agama Budha
15.	209114	Ida Bagus Kartika Dewi, S.E., M.Psi.	- Agama Budha
16.		Sujana, S.Pd.B.	- Agama Budha
17.	210243	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc.	- Agama Hindu
18.	211149	Ni Putu Swasti, S.E., S.Pd.H., M.Pd.H.	- Agama Hindu
19.	210250	Tan Djin Meng, S.T.	- Agama Khonghucu
20.	209113	Dr. Oesman Arif, M.Pd.	- Agama Khonghucu
21.	206701	Drs. Haryadi, M.Si.	- Etika Multikultural
22.	200606	Drs. Priyatmoko, M.A.	- Etika Multikultural
23.	186005	Dra. Edna Sri Redjeki	- Etika Multikultural
24.	212004	Paula Swandayani Hartanto, S.H., M.Kn.	- Etika Multikultural
25.	209008	Olly Wicaksono Pratamasari, S.E., M.MT.	- Etika Multikultural
26.	191001	Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
27.	217055	Yusrambono, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
28.	217055	Dr. Martono, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
29.	206702	Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
30.	212159	Dr. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
31.	217035	Sudarsono, S.H., M.S.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
32.	196027	Drs. Anastasia Innurtrisniyati, M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
33.	179008	Drs. ec. Noerjanto, M.M.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
34.	184008	Supriono, S.H., M.Hum.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
35.	209103	Dr. Heri Suharyanto	- Pancasila dan Kewarganegaraan
36.	212142	Nanang Haryono, S.IP., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
37.	210243	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
38.	215100	Poernomowati, S.H., M.M., M.H.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
39.	217034	Heru Susanto, S.H., M.Hum.	- Pancasila dan Kewarganegaraan

#### 4. Dosen Tidak Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	209134	Prof. Dr. Dr. Med. H. Soekri Erfan Kusuma	- Hukum Forensik
2.	212159	Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.	- Hukum Acara Pidana - Hukum Kepailitan
3.	215103	Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.	- Hukum Jaminan - Hukum Perbankan
4.	186006	Drs. ec. Soedarjanto, PS., M.S.	- Dasar-dasar Manajemen
5.	184008	Supriono, S.H., M. Hum.	- Hukum Pengangkutan
6.	208701	Dr. Drs. Besin Gaspar, M.Pd.	- Bahasa Inggris
7.	215133	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Hukum Perubahan Sosial - Hukum Adat
8.	206014	Yenny Hartanto, S.E., M.Pd.	- Bahasa Inggris
9.	208234	Rusli Dewi, M.Pd.	- Bahasa Inggris
10.	217120	Siti Zuraida, S.H., M.Hum.	- DDM - Hukum Islam

#### 9. Penutup

Dengan pelaksanaan yang konsisten disertai dukungan yang tulus dari segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Insya Allah Kurikulum baru ini dapat membantu memperlancar realisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas hukum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam naskah Strategic Planning Fakultas Hukum Universitas Surabaya 2011-2018.